



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA DEPOK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YADI KUSMAYADI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 83981

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.748.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/120 m2 di CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 555.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/20 m2 di CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/200 m2 di CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
4. Tanah Seluas 266 m2 di CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 308 m2/200 m2 di CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/140 m2 di CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
7. Tanah Seluas 700 m2 di CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
8. Tanah Seluas 1988 m2 di CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 397.000.000
9. Tanah Seluas 1190 m2 di CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 238.000.000
10. Tanah Seluas 756 m2 di CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 113.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 188.500.000

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000



2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 160.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL
SENDIRI Rp. 7.000.000
5. LAINNYA, --- MESIN RUMPUT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
1.500.000

| | | |
|--|------------|----------------------|
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 13.500.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | --- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | --- |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | --- |
| Sub Total | Rp. | 2.950.000.000 |
| III. HUTANG | Rp. | --- |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 2.950.000.000 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LINGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.